
ANALISIS RETROSPEKTIF KEBIJAKAN RELOKASI PASAR PAHING DI KOTA BLITAR

Kristiana, Rossa

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga
Email: rossa.kristiana12@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to obtain an overview of retrospective analysis of Pahing Market relocation policy. Information from the results of this study can be a consideration or input for policy makers in solving problems and improve the quality of policies that have been made. Market relocation is one form of policy from the government of Blitar City in developing the people market in Blitar City. Researchers used a retrospective analysis in researching the relocation of the Pahing Market with reference to William N. Dunn's theory. This research uses qualitative descriptive research method. The informants selected in this study were old Pahing Market traders, traders in Pasar Pahing, Pahing Market buyers and visitors, residents around the old Pahing Market, people around Pasar Pahing new, Pahing Market manager, and apparatus from the Department of Industry and Trade of Blitar City. Informant determination technique in this research by purposive and snowball. Data collection techniques used interview techniques, observation, and documentation. The technique of data analysis through four processes: (1) data collection, (2) data reduction, (3) data presentation, and (4) drawing conclusions. And to test the validity of data in this study using triangulation. The result of retrospective analysis is information obtained after the policy action is done or after the implementation phase of the relocation policy is done. Based on monitoring, although Pahing Market becomes a safer, more comfortable and clean market, the market situation is quiet. The result of the relocation policy is not yet able to fulfill the needs and wants of the community. After the evaluation, the government of Blitar City decided to take action to build additional kiosk in Pasar Pahing and renovate the market stall. The policy recommendations of the researchers is to redesain the market model into a semi-modern market.

Keywords: Market Relocation, Retrospective Analysis, Traditional Market

Pendahuluan

Pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda, dengan bertumbuhnya penduduk setiap waktu dan seiring dengan berkembangnya zaman membuat kebutuhan serta keinginan dari masyarakat semakin beragam pula jenisnya. Secara tidak langsung masyarakat akan menuntut adanya peningkatan dari segi kualitas dan kuantitas. Kebutuhan dan keinginan setiap orang menciptakan suatu permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dan penawaran menimbulkan aktivitas perekonomian yang disebut jual beli. Keberadaan penjual dan pembeli di pasar sangatlah penting karena akan menciptakan berbagai macam transaksi barang dan jasa.

Saat ini bisnis ritel atau perdagangan secara eceran merupakan salah satu aktivitas jual beli yang sangat populer di Indonesia, Hal tersebut terjadi karena bisnis ritel atau perdagangan secara eceran merupakan bentuk perdagangan yang langsung memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu bisnis ritel dapat membuka banyak lapangan pekerjaan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Pfeffermann (2000) jika sektor informal, termasuk berdagang di pasar tradisional menyumbang 58%

kesempatan kerja dan mampu membebaskan seseorang dari belenggu kemiskinan.

Bisnis ritel adalah penjualan barang secara eceran pada berbagai tipe gerai seperti kios, pasar, *department store*, butik dan lain-lain (termasuk juga penjualan dengan *system delivery service*) yang umumnya untuk dipergunakan langsung oleh pembeli yang bersangkutan. Bisnis ritel di Indonesia terdiri dari ritel tradisional dan ritel modern, ritel modern pada dasarnya merupakan pengembangan dari ritel tradisional.

Kehadiran berbagai jenis ritel modern menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara ritel modern dan ritel tradisional dimana ritel tradisional yang masih digemari oleh masyarakat dengan status sosial ekonomi menengah ke bawah dan ritel modern yang identik dengan masyarakat dengan status sosial ekonomi menengah ke atas. Dengan perbedaan karakter yang berbeda, namun memiliki fungsi yang sama, seringkali memunculkan kesenjangan dan memunculkan kecemburuan sosial. Namun pada penelitian yang dilakukan Goldman dan Hino (2005), membuktikan sebaliknya. Faktor etnis dan budaya turun temurun, serta faktor geografis dapat memberi

pengaruh yang bertolak belakang. Masyarakat dengan status sosial ekonomi menengah atas dapat lebih memilih berbelanja di pasar rakyat dibandingkan di pasar modern. Alasannya sederhana, jarak membuat pasar rakyat lebih mudah untuk dijangkau dibandingkan pasar modern yang cenderung berada di tengah kota. Dan produk yang ditawarkan di pasar rakyat cenderung lebih bervariasi, segar dan lebih memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Ikatan Pedagang Pasar Tradisional (IKAPPI) menyebutkan bahwa pertumbuhan dari pasar modern telah mencapai 36.000 gerai di seluruh Indonesia. Wakil Sekretaris Jendral DPP IKAPPI, Mohammad Ainun Najib dalam keterangan resminya menilai jika jumlah tersebut menimbulkan kekhawatiran karena jumlah tersebut melebihi dari jumlah pasar rakyat yang hanya berjumlah 12.000 pasar. Sejalan dengan data pada IKAPPI tersebut, pada data AC Nielsen menyebutkan jika pasar modern tumbuh sebesar 31,4 persen, sedangkan pasar tradisional mengalami pertumbuhan negatif 8,1 persen.

Data tersebut dapat ditafsirkan jika dibalik kesuksesan yang dialami pasar modern ternyata berdampak buruk untuk pasar rakyat. Hasilnya pasar rakyat menjadi kurang diminati oleh masyarakat dan bahkan semakin terpinggirkan karena kurang dianggap kompetitif. Sehingga kemudian mengakibatkan kerugian pada pasar dan tak sedikit pula yang hingga akhirnya pasar rakyat yang ada mengalami kebangkrutan karena aktivitas di pasar sudah sepi.

Banyak faktor yang melatarbelakangi masyarakat mulai meninggalkan pasar rakyat, antara lain karena citra buruk yang berkembang seperti pasar rakyat identik dengan tempat kotor, kumuh, bau karena buruknya sirkulasi udara, becek ketika musim hujan tiba, semrawut karena jumlah pedagang yang melebihi kapasitas, rawan adanya tindak kejahatan, tidak lengkap atau tidak berfungsinya fasilitas pasar, pasar rakyat dinilai tidak sehat sehingga rawan terjadi penyebaran penyakit dan banyaknya kejadian kebakaran di pasar rakyat. Oleh karenanya banyak masyarakat yang mengeluhkan kurang aman dan nyaman jika berbelanja di pasar.

Upaya untuk dapat meningkatkan kinerja secara optimal dan efisien dalam melayani kebutuhan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan maupun meningkatkan daya saing pasar rakyat terhadap pasar modern, diperlukan peran pemerintah untuk menata kembali serta memberikan pembinaan untuk pasar. Karena pasar rakyat akan sulit bersaing tanpa bantuan pihak dan perlindungan dari pemerintah. Penataan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah dapat berupa tindakan pembangunan dan/atau revitalisasi. Kebijakan ini sangat penting mengingat pasar merupakan asset

dari pemerintah daerah dan pembangunan dan/atau revitalisasi dari pasar rakyat memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Sebagai negara hukum, instrumen-instrumen hukum yang telah dibuat harus menjadi dasar berpijak dan harus dioptimalkan untuk mewujudkan kesejahteraan dimasyarakat. Sebagai dasar perekonomian Indonesia, pada Pasal 33 UUD 1945 dalam hal ini khususnya ayat (1) dan ayat (4) dengan jelas menyebutkan bahwa :

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
- 2) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Untuk dapat memberikan perlindungan dan memberdayakan pasar rakyat agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerintah Kota Blitar juga melakukan upaya pembangunan dan/atau revitalisasi terhadap pasar. Pembangunan dan/atau revitalisasi pasar rakyat di Kota Blitar menjadi penting dilakukan mengingat jika pasar rakyat berpotensi dalam peningkatan PAD Kota Blitar sekaligus sangat penting untuk peningkatan pendapatan bagi masyarakat Kota Blitar khususnya. Hampir semua pasar rakyat di Kota Blitar sudah mengalami pembangunan dan/atau revitalisasi. Berikut merupakan data pasar rakyat Kota Blitar beserta tahun pembangunan dan/atau revitalisasi dan alamatnya.

Tabel 1 Pasar Rakyat di Kota Blitar Februari 2017

Nama Pasar Rakyat	Tahun Pembangunan	Alamat
1. Pasar Wage	2017	Jl.Mastrip
2. Pasar Pon	2012	Jl. R.A. Kartini
3. Pasar Pahing	2011	Jl. Bengawan Solo
4. Pasar Karangtengah	2005	Jl. Bali
5. Pasar Legi	2004	Jl. Mawar
6. Pasar Dimoro	2003	Jl. Batanghari
7. Pasar Loak/Mbelehan	2002	Jl. Kacapiring
8. Pasar Bungur	1963	Jl. Bungur

9. Pasar Templek	1962	Jl. Anggrek
------------------	------	-------------

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim

Ke sembilan pasar rakyat di Kota Blitar tersebut dibangun dan dikelola oleh pemerintah Kota Blitar, waktu beroperasi pasar setiap hari dan aktif pada dini hari menjelang siang hari. Setelah mengalami pembangunan dan/atau revitalisasi, perubahan-perubahan yang terjadi pada pasar rakyat di Kota Blitar antara lain pengelolaan parkir tertata rapi, infrastruktur yang lebih lengkap dan bekerja dengan baik, serta tempat yang lebih bersih dan nyaman untuk pedagang maupun pembeli untuk melakukan transaksi jual beli.

Pembangunan dan/atau revitalisasi dari pasar rakyat yang dilakukan pemerintah Kota Blitar sebagian besar sukses dilakukan sehingga pasar rakyat dapat bekerja secara optimal dan efisien seperti sedia kala, namun terdapat masalah dengan Pasar Pahing yang mengalami relokasi. Pada mulanya Pasar Pahing dibangun dan resmi dibuka pada April tahun 2011 oleh Muhammad Samanhudi Anwar, SH selaku Walikota Blitar yang ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Walikota dan pengguntingan pita oleh ketua tim Penggerak PKK Kota Blitar. Adapun keputusan untuk dilakukan relokasi terhadap Pasar Pahing dihasilkan setelah dilakukan rapat pertemuan antar dewan legislatif dan eksekutif yang menghasilkan Perwali Nomor 16 Tahun 2009 pada tanggal 22 Juli Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2010.

Salah satu upaya dari pemerintah Kota Blitar saat itu dalam memperkenalkan Pasar Pahing yang mengalami relokasi ialah dengan melakukan sosialisasi sebelum maupun sesudah relokasi. Pengelola Pasar Pahing, Bapak Seno menyebutkan jika sosialisasi telah dilakukan kepada pedagang Pasar Pahing lama. Selain itu, juga diadakan pasar malam yang dipersembahkan oleh paguyuban Pasar Legi pada tanggal 23 Mei 2011 pertunjukkan ini diharapkan agar pasar rakyat ini bisa beroperasi 24 jam. Kemudian, pelaksanaan peresmian Pasar Pahing yang baru juga diisi dengan penjualan sembako murah yang diselenggarakan atas kerjasama dengan pihak sponsor. Ada sekitar 200 paket sembako yang berisi beras, minyak goreng, gula dan mie instant yang perpaketnya senilai Rp.17.500 dijual dengan harga Rp.12.000. Pembelian sembako tersebut menggunakan sistem kupon untuk warga dari kalangan ekonomi kurang mampu. Upaya-upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan keberadaan Pasar Pahing di tempat yang baru.

Adapun retribusi pada Pasar Pahing setelah mengalami relokasi berbeda-beda jumlahnya yaitu sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku pada saat

itu. Biaya lain yang dikeluarkan pedagang selain retribusi ialah biaya untuk listrik dan air, dimana diketahui jika penggunaan air dan listrik setiap pedagang berbeda satu sama lainnya menurut jenis kebutuhan masing-masing pedagang. Sementara pengelolaan parkir tidak dipungut biaya karena untuk menarik masyarakat untuk berkunjung ke Pasar Pahing.

Relokasi dilakukan ditempat lahan kosong milik pemerintah daerah yang lebih besar dan dirasa potensial untuk di bangun sebuah pasar, tempatnya tidak jauh yaitu ± 700 m dari jarak Pasar Pahing lama. Lahan kosong tersebut berada di perempatan sehingga pemerintah memprediksi akan ramai masyarakat untuk berkunjung sehingga dapat memberi semangat warga sekitar untuk berdagang lagi. Adapun luas tanah Pasar Pahing sebelum relokasi sebesar 635m² dan luas tanah Pasar Pahing sekarang sebesar 1541 m².

Namun selama 6 tahun Pasar Pahing berdiri, keadaan Pasar Pahing baru yang menelan biaya lebih dari Rp 150 juta untuk relokasi tampak sepi di pagi maupun sore hari. Relokasi yang dilakukan pemerintah Kota Blitar tidak secara berkelanjutan dapat menarik banyak pembeli untuk datang. Hal ini tampak berbeda saat pembukaan awal dan 2 bulan setelah pembukaan, keadaan pasar ramai pembeli dan pedagang. Namun sekarang berbeda, banyak kios atau los di Pasar Pahing baru yang tutup sehingga mengakibatkan pengunjung maupun pembeli Pasar Pahing juga semakin berkurang.

Upaya pengundian ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat Kota Blitar yang berniatan untuk berdagang di Pasar Pahing. Hal ini juga disebutkan oleh Suwoko, ST, MH, sebagai anggota komisi II DPRD Kota Blitar untuk memilih pedagang secara selektif namun tetap memprioritaskan pedagang Pasar Pahing lama dan warga Kelurahan Tanjungsari.

Seperti yang telah diketahui jika jumlah kios/los pedagang berjumlah 60 orang dengan perpaduan antara pedagang lama dan baru. Sebanyak 30 stand ditempati oleh pedagang lama dan 30 stand ditempati pedagang baru. Para pedagang baru ini terdiri dari warga lokal sekitar pasar tradisional yang mengajukan ke Kantor Pasar. Seperti dari Kelurahan Tanjungsari, Pakunden dan Kelurahan Blitar. Hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah Pada Bab V pasal 5 ayat 2 Butir c dalam PP Nomor 112 Tahun 2007, disebutkan bahwa dalam rangka pembinaan pasar tradisional, pemerintah daerah memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar tradisional.

Arianto menjelaskan penempatan pedagang ditentukan melalui 3 kali pengundian. Dari total 60 los baru Pasar Pahing, penempatan prioritas untuk pedagang lama 30 orang, terdiri dari 22 pedagang aktif dan 8 pedagang non aktif yang diminta untuk memilih los lebih dahulu. Kemudian, undian kedua untuk warga Kelurahan Tanjungsari melalui kelurahan setempat yang dijatah 10 los. Undian ketiga dilakukan di kantor pasar dengan 20 los, diantara mereka adalah pedagang dari Kelurahan Pakunden dan sejumlah kelurahan lainnya. Arianto memastikan bahwa dalam proses pengundian pedagang ini dilakukan secara gratis dan tidak ada pungutan, jika diketahui ada pungutan pihaknya siap mempertanggungjawabkannya.

Sampai pada penelitian ini dilakukan yaitu Juni 2017, hanya terdapat 10 pedagang yang berjualan di Pasar Pahing dari 60 kios/los yang telah disediakan atau hanya terdapat sejumlah 16,6% pedagang yang ada di pasar. Upaya ini dilakukan dengan memindah tempat Pasar Pahing di Kelurahan Pakunden ke tempat baru di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. Lahan pada Pasar Pahing lama akan direncanakan untuk pelebaran kantor Kelurahan Pakunden dimana tempat kecamatan tersebut tepat berada di samping pasar.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan bahwa peneliti ingin memfokuskan penelitian setelah aksi kebijakan atau setelah diimplementasikan kebijakan. Keadaan Pasar Pahing menjadi sepi setelah diimplementasikan nya kebijakan relokasi pasar dilakukan. Penelitian ini menjadi menarik karena perubahan jaman yang semakin modern dan perubahan masyarakat yang menjadi ingin serba praktis, instan, dan fleksibel.

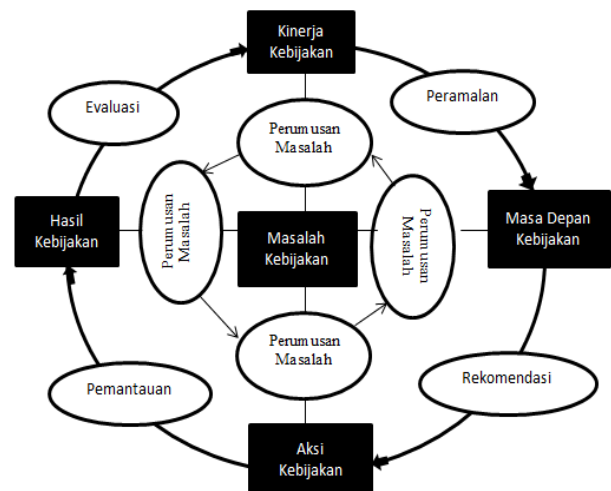
Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan analisis retrospektif dari kebijakan relokasi Pasar Pahing di Kota Blitar sehingga informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan atau masukan bagi pembuat kebijakan dalam memecahkan masalah serta meningkatkan kualitas kebijakan yang telah dibuat.

Manfaat penelitian ini secara akademis diharapkan memberikan tambahan pengetahuan dalam studi Ilmu Administrasi Negara, terutama yang mengkaji analisis kebijakan publik. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada pihak-pihak yang terkait khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar yang memiliki kewenangan menangani pasar di Kota Blitar agar dapat dijadikan sebagai masukan serta pertimbangan dalam hal penyusunan kebijakan yang tepat dalam menangani masalah yang ada selanjutnya.

Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan menurut William N. Dunn ialah aktivitas menciptakan pengetahuan yang relevan dari kebijakan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan dan memperbaiki suatu kebijakan. Dalam bukunya, William Dunn menjelaskan mengenai analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah yang terdiri dari lima tipe informasi yang relevan kebijakan yang ditransformasikan dari satu ke lainnya dengan menggunakan lima prosedur analisis kebijakan. Penggunaan prosedur analisis kebijakan (perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan enlaian/evaluasi) memungkinkan analisis mentransformasikan satu tipe informasi ke tipe informasi lainnya. Informasi dan prosedur bersifat saling tergantung; mereka terkait di dalam proses dinamis transformasi informasi kebijakan. Oleh karena itu komponen-komponen informasi kebijakan (masalah kebijakan, kinerja kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan) ditransformasikan dari satu ke yang lainnya dengan menggunakan prosedur analisis kebijakan. Berikut adalah bagan analisis kebijakan menurut William Dunn beserta penjelasan singkatnya:

Bagan 1 Analisis Kebijakan yang Berorientasi pada Masalah



Sumber : William N. Dunn 2003, 21

Kelima tipe informasi yang relevan dengan kebijakan (masalah kebijakan, kinerja kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan) saling berhubungan dan saling bergantung. Tanda panah yang menghubungkan setiap komponen informasi menggambarkan proses dinamis di mana satu tipe informasi dipindahkan ke informasi lain dengan menggunakan prosedur analisis yang tepat (perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, evaluasi).

Bentuk analisis kebijakan terdiri atas 1. Analisis kebijakan Prospektif 2. Analisis Kebijakan Retrospektif 3. Analisis kebijakan yang terintegrasi. Hubungan antara komponen-komponen informasi kebijakan dan metode-metode analisis kebijakan memberi landasan untuk membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan, yang dapat digambarkan seperti berikut:

Berikut merupakan bentuk dari analisis kebijakan dengan merujuk William N. Dunn:

1. Analisis kebijakan prospektif berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan.
2. Analisis kebijakan retrospektif, dijelaskan sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Mencakup berbagai tipe kegiatan yang dikembangkan oleh tiga kelompok analis:
 - 1) Orientasi pada disiplin (*Discipline-oriented analysts*)
 - 2) Orientasi pada masalah (*Problem-oriented analysts*)
 - 3) Orientasi pada aplikasi (*Applications-oriented analysts*)
3. Analisis Kebijakan yang Terintegrasi
 Analisis terintegrasi merupakan gabungan antara analisis prospektif dan retrospektif. Analisis ini cenderung kepada penciptaan tranformasi kebijakan sebelum dan sesudah tindakan kebijakan dilakukan.

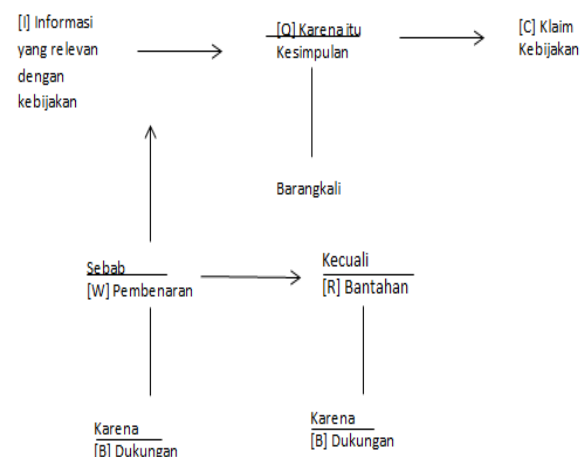
Berdasarkan bentuk-bentuk analisis kebijakan yang telah diuraikan diatas, penelitian ini menggunakan dalam kebijakan retrospektif / *ex-post* karena peneliti ingin memfokuskan pengembangan informasi setelah aksi kebijakan dilakukan. Dan orientasi pada aplikasi digunakan oleh peneliti karena penelitian dalam bidang administrasi negara lebih sesuai jika menggunakan orientasi ini. Tugas dari para "analis kebijakan" disini adalah memberikan informasi kepada pembuat kebijakan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah serta meningkatkan kualitas kebijakan yang telah dibuat oleh organisasi atau lembaga pemerintah.

Meskipun produksi dan transformasi informasi merupakan hal yang esensial dalam analisis kebijakan, yang tidak kalah penting dalam analisis kebijakan adalah penciptaan dan penilaian secara kritis klaim pengetahuan yang didasarkan atas informasi tersebut. Argumen-argumen kebijakan, yang merupakan sarana untuk melakukan perdebatan mengenai isu-isu kebijakan publik. Argumen kebijakan berperan dapat mengubah informasi yang relevan dengan kebijakan menjadi pengetahuan yang siap pakai.

Argumen kebijakan mempunyai enam elemen atau unsur, antara lain

1. Informasi yang relevan dengan kebijakan (*policy-relevant information*), yang dihasilkan melalui penerapan berbagai metode merupakan bukti dari kerja analis.
2. Klaim kebijakan (*policy claim*), merupakan kesimpulan dari argumen kebijakan. Klaim kebijakan merupakan konsekuensi logis dari informasi yang relevan bagi kebijakaan.
3. Pembeneran (*warrant*), merupakan suatu asumsi di dalam argument kebijakan yang memungkinkan analis untuk berpindah dari informasi yang relevan dengan kebijakan ke klaim kebijakan.
4. Dukungan (*backing*), dukungan (B) bagi pembeneran (W) terdiri dari asumsi-asumsi tambahan atau argumen-argumen yang dapat digunakan untuk mendukung pembeneran yang tidak diterima pada nilai yang tampak.
5. Bantahan (*rebuttal*), bantahan (R) merupakan kesimpulan yang kedua, asumsi, atau argumen yang menyatakan kondisi di mana klaim asli tidak diterima, atau klaim asli hanya dapat diterima pada derajat penerimaan tertentu.
6. Kesimpulan (*qualifier*), kesimpulan mengekspresikan derajat dimana analis yakin terhadap suatu klaim kebijakan. Ketika analis secara penuh yakin terhadap suatu klaim suatu kesimpulan tidak diperlukan.

Bagan 2 Elemen-elemen Argumen Kebijakan



Sumber: William N. Dunn 2003, 100

Struktur argumen kebijakan mengilustrasikan bagaimana para analis dapat menggunakan informasi untuk merekomendasikan pemecahan bagi masalah-masalah kebijakan. Argumen ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan mentransformasi informasi

ke dalam pengetahuan yang dapat dipahami dan dipercaya, sehingga kemudian menjadi terbuka oleh tantangan dan menerima kritikan sehingga mampu menyelesaikan sebuah masalah dan bukan melakukan pembenaran terhadap alternatif-alternatif kebijakan yang disukai.

Selanjutnya bentuk dari argumen memungkinkan kita untuk mengubah informasi yang relevan dengan kebijakan menjadi pernyataan kebijakan. Bentuk argumen yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan cara klasifikasi yaitu dalam cara klasifikasional, pernyataan kebijakan didasarkan pada argumen yang berasal dari suatu keanggotaan. Informasi diubah menjadi pernyataan kebijakan atas dasar asumsi bahwa apa yang benar bagi suatu kelas individu ataupun kelompok yang tercakup dalam informasi itu juga benar bagi individu atau kelompok yang merupakan (atau diyakini sebagai) anggota di kelas yang bersangkutan. Kelompok-kelompok dalam penelitian analisis kebijakan relokasi pasar ini terdiri atas, kelompok aparaturnya pemerintahan Kota Blitar, kelompok pedagang, kelompok pembeli dan pengunjung, dan kelompok warga sekitar.

Ritel di Indonesia

Bisnis ritel adalah penjualan barang secara eceran pada berbagai tipe gerai seperti kios, pasar, department store, butik dan lain-lain (termasuk juga penjualan dengan *system delivery service*), yang umumnya untuk dipergunakan langsung oleh pembeli yang bersangkutan. Ritel yang berkembang di Indonesia terdiri dari ritel yang bersifat tradisional atau konvensional dan ritel yang bersifat modern. Ritel modern merupakan pengembangan dari ritel tradisional. Ritel yang bersifat tradisional adalah sejumlah pengecer atau pedagang eceran yang berukuran kecil dan sederhana, misalnya toko-toko kelontong, pengecer atau pedagang eceran yang berada di pinggir jalan, pedagang eceran yang berada di pasar tradisional, dan lain sebagainya. Kelompok bisnis ritel ini memiliki modal yang sedikit dengan fasilitas yang sederhana.

Menurut Peraturan Presiden RI Nomor 112 tahun 2007 pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

Kebijakan Relokasi Pasar

Relokasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah pemindahan suatu tempat ke tempat lain. Sebuah pasar membutuhkan lahan dan lokasi yang strategis, mengingat aktivitas yang terjadi di pasar tersebut dan pentingnya peran pasar sebagai salah satu komponen pelayanan kota, daerah dan wilayah yang mengakibatkan kaitan dan pengaruh dari masing-masing unsur penunjang kegiatan perekonomian kota. Dengan memiliki letak yang strategis, pasar akan lebih terjamin proses transaksi jual-belinya daripada pasar yang letaknya kurang strategis.

Pemerintah berperan dalam menentukan lokasi pasar melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkannya. Kebijakan ini dapat berupa dorongan ataupun hambatan dan bahkan larangan untuk pedagang berlokasi di tempat tertentu. Kebijakan tersebut didasari oleh adanya pengaturan perencanaan kota, penataan pertanahan ataupun ekonomi. Kebijakan relokasi pasar menurut peneliti ialah keputusan pemerintah mengenai pemindahan pasar dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Analisis Retrospektif Kebijakan Relokasi Pasar

Analisis retrospektif kebijakan relokasi pasar menghasilkan sejumlah informasi-informasi yang relevan tentang kebijakan pemindahan lokasi pasar yang telah dilakukan pemerintah untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah-masalah kebijakan yang ada sehingga apa yang dicita-citakan dapat tercapai. Masalah yang timbul dalam kebijakan relokasi ini ialah dimana tujuan dari dilakukannya relokasi belum tercapai secara maksimal.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di

1. Pasar Pahing Kota Blitar
Alamat: Jl. Bengawan Solo No.102, Tanjungsari, Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Alamat: Jl. Sumatera No. 60, Kota Blitar, Jawa Timur.
3. Kelurahan Tanjungsari
Alamat: Jl. Kalimantan No. 1 Kota Blitar, Jawa Timur

Penentuan informan dilakukan dengan *purposive* yaitu pengambilan sumber data melalui pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini karena informan dianggap paling tahu dan secara spesifik dapat memberi pemahaman tentang permasalahan dan fenomena yang terkait dengan penelitian (Creswell, 2014:217) dan berkembang menjadi *snowball* di

lapangan. Adapun informasn dalam penelitian ini terdiri dari

1. Aparatur Disperindag Kota Blitar
2. Pengelola Pasar Pahing
3. Pedagang Pasar Pahing lama
4. Pedagang Pasar Pahing
5. Warga masyarakat di sekitar Pasar Pahing lama
6. Warga masayarkat di sekitar Pasar Pahing baru
7. Pembeli dan pengunjung pasar

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk uji validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi.

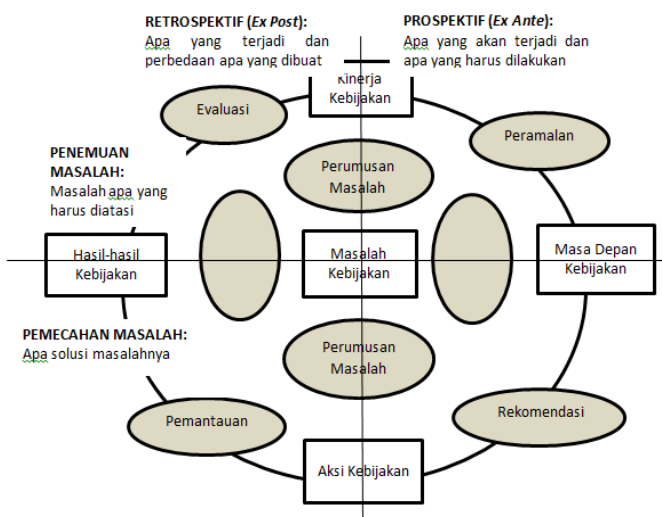
Relokasi Pasar Pahing Kota Blitar

Pada tahun 2011 Pasar Pahing baru resmi dibuka oleh Walikota Blitar. Pasar Pahing yang dahulu berada di Kelurahan Pakunden berpindah tempat di Kelurahan Tanjungsari. Pada dasarnya sebuah pasar membutuhkan lahan dan lokasi yang strategis, mengingat aktivitas yang terjadi di pasar tersebut dan pentingnya peran pasar sebagai salah satu komponen pelayanan kota, daerah, dan wilayah dalam mempengaruhi kegiatan perekonomian kota dengan cara melayani pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Pasar yang memiliki letak yang strategis akan lebih terjamin proses transaksi jual belinya daripada pasar yang letaknya kurang strategis. Setelah kebijakan relokasi pasar dilakukan, Pasar Pahing menjadi lebih aman, nyaman dan bersih.

Analisis Retrospektif Kebijakan Relokasi Pasar Pahing di Kota Blitar

Berikut merupakan hasil interpretasi dari analisis retrospektif kebijakan relokasi di Pasar Pahing Kota Blitar dengan merujuk teori William N. Dunn

Bagan 3 Analisis Kebijakan yang Berorientasi pada Masalah



Sumber : William N. Dunn 2003, 119

1. Prosedur Analisis Kebijakan

Berikut merupakan penjelasan dari analisis retrospektif atau kebijakan setelah aksi kebijakan dilakukan dengan dikaitkan oleh relokasi Pasar Pahing Kota Blitar

1) Perumusan Masalah

Kebijakan relokasi pasar diputuskan karena banyak faktor, salah satunya ialah sudah sepi nya Pasar Pahing lama, bangunan pasaryang sudah tidak layak pakai, hingga trmpat Pasar Pahing lama dapat mengganggu arus allu lintas yang ada. Dua bulan pertama setelah Pasar Pahing diresmikan, keadaan dari Pasar Pahing ramai pedagang, pembeli maupun pengunjung. Namun hal tersebut tampak berbeda sekarang, hanya terdapat 10 pedagang yang berjualan di pasar.

2) Pemantauan (deskripsi/impelementasi kebijakan)

Relokasi Pasar Pahing dilakukan oleh pemerintah Kota Blitar bertujuan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan di masyarakat Kota Blitar. Keadaan pasar pasca diimplementasikan kebijakan relokasi menjadi cukup baik, Pasar Pahing baru aman, nyaman dan bersih. Awal peresmian sampai kurang lebih 2 bulan berjalan, keadaan Pasar Pahing ramai pedagang maupun pembeli. Namun sejauh ini hasil yang diterima dari relokasi Pasar Pahing belum menghasilkan kinerja optimal dan efisien. Pasar Pahing sepi dari pedagang, pembeli, maupun pengunjung di pagi hari sampai sore hari.

Banyak faktor yang menyebabkan pasar menjadi sepi. Faktor utamanya ialah dapat dilihat dari sedikitnya pedagang yang berjualan menyebabkan pembeli maupun pengunjung pasar juga semakin sedikit. Hanya terdapat 10 pedagang yang menempati kios atau los di Pasar Pahing dari 60 kios atau los yang telah disediakan. Tempat parkir juga masih kosong dari kendaraan-kendaraan pembeli atau pengunjung pasar.

Karena pedagang yang berjualan sedikit membuat barang yang diperdagangkan juga minim varian dan ditambah harga barang di Pasar Pahing mahal sehingga masyarakat memilih untuk berbelanja di pasar lain yang lebih lengkap dan murah. Pendapat lain dari warga sekitar Pasar Pahing lama jika jarak pasar lumayan jauh dari Pasar Pahing yang lama. Disamping itu, terdapatnya persaingan yang

kurang sehat antar pedagang Pasar Pahing memberikan dampak yang negative terhadap keberadaan pedagang pasar.

3) Evaluasi (penilaian kebijakan)

Permasalahan yang terjadi di Pasar Pahing dapat teratasi jika semua pihak yang terlibat dapat saling bekerjasama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan dan perlindungan dari pemerintah sangat dibutuhkan oleh pasar rakyat saat ini untuk memberikan hasil yang lebih baik. Keterlibatan pemerintah dalam memberikan perhatian lebih kepada pedagang Pasar Pahing sangat dibutuhkan.

Evaluasi dilakukan pihak pemerintah dengan melakukan pendekatan dari para pemilik kios dan pemerintah Kota Blitar, khususnya Disperindag juga melakukan upaya sosialisasi di pasar. Rekomendasi yang dihasilkan dalam evaluasi permasalahan kebijakan relokasi ialah dengan pembangunan kios baru dan merenovasi kios di sebelah timur.

2. Tipe informasi yang relevan dengan kebijakan

Metode pengkajian yang digunakan dalam analisis retrospektif kebijakan relokasi pasar menghasilkan informasi mengenai

1. Aksi kebijakan (*policy action*)

Relokasi Pasar Pahing dilresmikan pada April 2011 oleh Walikota Blitar. Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan pemerintah Kota Blitar melakukan tindakan relokasi Pasar Pahing di Kota Blitar antara lain:

- 1) Keadaan Pasar Pahing lama sudah sepi dari pedagang dan pembeli
- 2) Kondisi tempat Pasar Pahing lama yang sudah tidak layak huni dan sempit, serta
- 3) Tempat Pasar Pahing lama yang mengalami gangguan lalu lintas
- 4) Terdapat lahan kosong milik pemerintah dengan luas area yang lebih besar

Adapun tujuan dari Pemerintah Kota Blitar merelokasi Pasar Pahing dengan maksud untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, secara spesifik tujuannya untuk mengembangkan pasar rakyat di Kota Blitar mengingat pasar rakyat di Kota masih sangat berpengaruh untuk Kota Blitar. Belum meningkatnya pertumbuhan pasar modern di Kota Blitar membuat Pasar rakyat di Kota Blitar masih sangat digemari oleh masyarakat. Oleh karena itu untuk memberikan perubahan dari Pasar Pahing yang sudah tidak memberikan kenyamanan maupun keamanan pada waktu lalu, pemerintah mengambil tindakan untuk membenahi pasar dengan upaya merelokasi.

2. Hasil kebijakan (*policy outcome*)

Hasil dari kebijakan relokasi belum menghasilkan perkembangan yang lebih baik. Keadaan pasar sepi, hanya terdapat 10 pedagang yang berjualan di pasar. Walaupun keadaan Pasar Pahing setelah direlokasi menjadi aman, nyaman serta bersih namun aktivitas jual beli di pasar jarang ditemui. Hal ini berdampak pada segi ekonomi pasar yang tidak meningkat sehingga tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sumber pendapatan daerah dan cenderung membuat pedagang di pasar merugi. Selain itu, sebagai tempat pemenuhan kebutuhan dan keinginan, Pasar Pahing belum mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan dari masyarakat. Serta Pasar Pahing belum maksimal dalam memberikan tempat kerja.

3. Kinerja Kebijakan (*policy performance*)

Pemerintah mengambil tindakan untuk membangun kios baru dan merenovasi kios sebelah timur. Pembangunan kios ini baru saja dimulai pada bulan Maret 2017 lalu dan akan diprediksikan selesai sebelum akhir tahun. Penambahan kios berjumlah 4 buah di lokasi sebelah timur pasar dekat dengan pintu keluar Pasar Pahing.

Kebijakan lain dari pemerintah ialah merenovasi kios sebelah timur pasar. Tembok kios akan dibongkar sehingga memiliki 2 arah. Arah ke barat menghadap ke dalam pasar, dan arah ke timur menghadap ke jalan raya. Kebijakan ini membuat para pedagang menjadi sangat senang, sebab kios akan menghadap ke jalan raya sehingga dengan secara tidak langsung pedagang dapat mempromosikan secara gratis barang dagangannya dan pengguna jalanpun juga dapat melihat langsung apa barang yang diperdagangkan oleh penjual pasar. Kebijakan baru ini disambut positif oleh pedagang pasar dan pedagang berharap pasar akan lebih ramai. Namun dibalik sambutan positif dari pedagang pasar, terdapat masyarakat yang menganggap jika tindakan pemerintah tersebut hanya terkesan membuang uang rakyat.

Selanjutnya merupakan penjelasan dari argument kebijakan klasifikasional yang dikaitkan dengan relokasi Pasar Pahing Kota Blitar.

Informasi

Pada April 2011, Pasar Pahing resmi dibuka oleh Walikota Blitar di tempat baru. Tujuan di relokasi ialah untuk mengembangkan pasar rakyat di Kota Blitar. Namun keadaan Pasar Pahing sepi.

Pembenaran

Kebijakan relokasi sukses dilakukan, keadaan Pasar Pahing baru nyaman, aman dan bersih. Namun pedagang yang berjualan saat ini hanya berjumlah 16,7%. Ditambah dengan kurangnya variasi produk di pasar serta tingginya harga barang yang ditawarkan membuat warga sekitar memilih membeli di pasar lain yang lebih lengkap dan murah. Warga masyarakat di sekitar Pasar Pahing lama menganggap jarak pasar yang lumayan jauh membuat banyak warga memilih untuk membeli barang di pedagang keliling.

Dukungan

Banyak sebab yang mempengaruhi pedagang Pasar Pahing tidak berjualan di pasar, faktor utamanya ialah pedagang mengaku jika kekurangan modal usaha untuk berdagang. Selain itu adanya persaingan yang tidak sehat antar pedagang turut andil dalam keberadaan pedagang.

Klaim Kebijakan

Solusi yang dilakukan pemerintah Kota Blitar ialah dengan melakukan upaya pembongkaran 3 kios sebelah timur untuk dijadikan kios yang memiliki pintu dua arah dan pembangunan 4 kios baru. Kebijakan baru tersebut menuai pro kontra dari pedagang maupun masyarakat.

Bantahan

Rekomendasi dari penulis ialah me redesain pasar menjadi pasar semi modern, dan pemerintah dapat mengadakan event sesering mungkin di Pasar Pahing.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah dilakukan tentang analisis retrospektif kebijakan relokasi Pasar Pahing Kota Blitar, dengan menggunakan teori William Dunn, dapat disimpulkan bahwa kebijakan relokasi di Pasar Pahing Kota Blitar belum bekerja dengan baik. Setelah 6 tahun berdiri, keadaan Pasar Pahing tetap sepi, terbukti dengan hanya terdapat 10 pedagang yang ditemui di pasar. Pedagang belum dapat mempertanggungjawabkan kios/los yang telah disediakan dengan baik Sehingga dapat disimpulkan jika Pasar Pahing belum mampu memenuhi kebutuhan atau keinginan dari masyarakat. Oleh karenanya diperlukan alternatif kebijakan lain untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada.

Adapun sebab dan tujuan dilakukannya kebijakan relokasi pasar ialah karena keadaan Pasar Pahing lama yang sudah sepi dari pedagang maupun pembeli dan kondisi dari Pasar Pahing yang sudah tidak layak huni. Sasaran dari kebijakan relokasi Pasar Pahing ialah untuk kesejahteraan masyarakat Kota

Blitar dan untuk pengembangan pasar rakyat di Kota Blitar agar lebih maju. Adapun dampak dari kebijakan relokasi Pasar Pahing ialah keadaan pasar yang lebih baik yaitu lebih aman dan nyaman serta fasilitas yang tersedia berfungsi dengan baik. Kebijakan yang dilakukan pemerintah Kota Blitar juga tidak menimbulkan penolakan dari warga sekitar Pasar Pahing lama maupun dari pedagang Pasar Pahing lama.

Faktor utama yang menjadi penyebab sepi nya pasar ialah tidak adanya pedagang yang berjualan. Terbukti hanya 10 pedagang yang berjualan di pasar dari 60 kios/los yang tersedia. Oleh karenanya warga masyarakat sekitar Pasar Pahing enggan melakukan transaksi di Pasar Pahing karena kurang lengkapnya produk yang ditawarkan hingga mahal nya harga barang yang dijual di Pasar Pahing. Tidak sedikit warga masyarakat di sekitar Pasar Pahing memilih untuk pergi ke pasar besar atau pasar yang lebih lengkap dan sebagian warga juga memilih untuk membeli kebutuhan di pedagang keliling. Adapun yang menyebabkan pedagang yang berjualan sedikit antara lain karena pedagang kekurangan modal usaha ataupun pedagang Pasar Pahing lama mengaku jarak rumah dengan Pasar Pahing baru jauh sehingga pedagang memutuskan untuk berhenti berdagang ataupun berjualan di rumah. Selain itu persaingan yang kurang sehat antar pedagang di pasar juga turut berpengaruh terhadap keberadaan pedagang di pasar.

Alternatif kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Blitar ialah dengan membangun 4 kios baru di sebelah timur pasar dan merenovasi kios pasar dengan merombak tembok kios sehingga kios memiliki pintu 2 arah. Namun Kebijakan ini menuai pro kontra dari pedagang maupun masyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dari relokasi pasar berasal dari internal dan eksternal.

Saran

Pemerintah Kota Blitar, khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar bagian Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar harus lebih memperhatikan perkembangan dari pasar rakyat di Kota Blitar secara berkelanjutan. Peran pemerintah sangat penting karena pasar rakyat akan sulit berkembang tanpa bantuan dan perlindungan dari pemerintah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar diharapkan bergerak cepat untuk menangani masalah-masalah yang timbul dari pasar. Lebih penting lagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar harus memberikan solusi yang tepat dari masalah yang tepat di lapangan. Untuk pedagang Pasar Pahing yang telah memiliki hak milik kios/los di Pasar Pahing Kota Blitar harus mempertanggungjawabkan tempat kios atau los yang telah disediakan dan harus memanfaatkan sebaik-sebaiknya.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk mengembalikan dan mempertahankan kinerja Pasar Pahing agar dapat bekerja secara optimal dan efisien lagi dengan kondisi pasar ramai dibutuhkan pengeloaan dan pemberdayaan yang baik pada pasar. Rekomendasi dari peneliti ialah dengan cara menggabungkan konsep tradisional dan konsep modern. Caranya yaitu dengan tetap mempertahankan suasana pasar rakyat (adaya tawar menawar, adanya komunikasi yang baik antara pedagang dan pembeli) dan dengan memodernkan pasar rakyat tersebut melalui cara merubah perilaku penjual dengan memberikan pembinaan, mengelompokan lokasi penjual supaya lebih tertata, serta penambahan fasilitas yang mendukung pasar sehingga mampu mewujudkan suasana yang bersih, nyaman, teratur, dan aman bagi pengunjung yang berbelanja.

Pemerintah Kota Blitar, khususnya Disperindag Kota Blitar dapat melakukan revitalisasi Pasar Pahing menjadi pasar semimodern. Pasar semi modern adalah pasar yang mengalami transisi dari pasar rakyat menuju pasar modern. Dapat dikatakan modern karena bentuk fisik bangunan yang tetata rapi dan tertib antara stan satu dengan stan lainnya serta manajemen pasar yang tersusun secara terorganisir. Namun pasar jenis ini masih ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung yang biasanya ada proses tawar menawar.

Dengan begitu diharapkan Pasar Pahing Kota Blitar menjadi lebih baik dan menciptakan kenyamanan bagi pengunjung maupun pembeli, sehingga Pasar Pahing Kota Blitar ramai dari pedagang, pembeli maupun pengunjung, sehingga pemenuhan akan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat akan tercapai.

Daftar Pustaka

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*, Jakarta: Penerbit Salemba Humankat
- Dewi, Rahayu Kusuma. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: Penerbit pustaka setia
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua*. Yogyakarta: Gadjah mada university press
- Fithrati, Nurul. 2010. *Pasar Modern*. Tangerang: Citra Lab
- Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshur. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-ruzz media
- Ibrahim, Amin. 2004. *Pokok-pokok Analisis Kebijakan Publik (AKP)*. Bandung: Mandar Maju
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo
- Pandin, Marina L. 2009. *Potret Bisnis Ritel Di Indonesia: Pasar Modern*. Economic Review. No.215. Maret 2009
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: ar-ruzz media
- Pujileksono, Sugeng. 2015. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Intrans publishing
- Siallahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Social*. Refika Aditama
- Siregar, R. Johny. 1991. *Peranan pasar pada masyarakat pedesaan di daerah Jambi*. Jakarta. Departemen pendidikan dan kebudayaan direktorat jendral kebudayaan
- Setijanigrum, Erna. 2011. *Buku Ajar Analisis Kebijakan Publik*. Surabaya: PT Revka Petra Media
- Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D*. Bandung. Alfabeta
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Social Sebagai Kebijakan*. Bandung: Public Alfabeta
- Sukriswanto, Uchang. 2012. "Analisis Kelayakan Revitalisasi Pasar Umum Gubug Kabupaten Grobogan". Tesis. Universitas Dipenogoro. Semarang
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

Yoga, Budi Winarno. 2004. *Teori dan proses kebijakan public*. Media Pressindo